

KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Oleh:
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH
NIM. E43011040

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: Nanda.ok66@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan konsep Moheriono untuk mengukur kinerja dengan tiga indikator yaitu Responsibilitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Saigon dilihat dari ketiga indikator tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja LPM di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dari segi Responsivitas yaitu kurang aktifnya para pengurus dalam kegiatan rapat LPM, kurang aktif pada Musrenbang serta lamban dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Pada responsibilitas masih kurang pengetahuan pengurus LPM Kelurahan Saigon dengan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Pada Akuntabilitas minimnya dokumen-dokumen seperti absensi dalam setiap kegiatan dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Saigon. Saran dalam penelitian ini adalah LPM Kelurahan Saigon dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pertemuan ataupun rapat sehingga dapat menentukan jadwal yang tepat dimana seluruh anggota LPM Kelurahan Saigon dapat hadir. Selain itu, pemerintah Kelurahan Saigon dapat memberikan sedikit bantuan dalam bentuk alat, barang ataupun pembinaan kepada seluruh anggota LPM.

Kata-kata Kunci : Kinerja, LPM Kelurahan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas

Abstract

This problem in this research is the performance of the Community Development Institute (LPM) in the Village of Saigon. This study used a qualitative descriptive approach. This research used Moheriono konsep with there indicator is Responsibility, Responsivitas, Akutanbility. This study used a qualitative descriptive approach for how to performance of the Community Development Institute (LPM) in the Village of Saigon. The result showed that the performance of LPM in the Saigon Village District of East Pontianak in Pontianak City from of Responsiveness is less active in the activities of the board meeting, slow in responding to community needs. Responsibility is still lacking knowledge with each task. On the lack of accountability documents such as attendance iin each activity and the lack of results in the form of documentation that the accountability report of activities implemented.

Keywords : Performance, Responsiveness, Responsibility, Accountability

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan. Ryaas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu : pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat pada kemandirian, kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, bukan serta merta dibebankan oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan karena mengingat fungsinya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, masyarakat akan memiliki bekal dan keahlian sehingga kesejahteraan dan taraf hidupnya sedikit meningkat.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 mengenai kelurahan fungsi yang harus dilaksanakan lurah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
(Perda Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan Bab 3 Pasal 9)

Salah satu fungsi kelurahan adalah melaksanakan pemberdayaan maka pemerintah kelurahan berdasarkan Surat Keputusan dari pusat membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan . Terbentuknya LPM ini telah ditetapkan pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ditetapkannya peraturan daerah tersebut, diharapkan LPM dapat menjadi mitra dari pemerintah kelurahan. Pembentukan LPM sebagai media partisipasi masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip partisipasi, yang merupakan satu diantara prinsip yang harus dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu dari tujuh kelurahan di Kecamatan Pontianak Timur yang membentuk LPM di kelurahannya adalah Kelurahan Saigon. Di bentuknya LPM di Kelurahan ini telah berjalan sejak tahun

2009. Kehadiran LPM di Kelurahan Saigon menjadi mitra bagi pemerintah di kelurahan dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, terutama yang berada di jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Dibentuknya LPM dapat menunjang pemerintahan yang baik sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dimana kelurahan terlibat secara langsung dalam perencanaan, pembangunan dan pelayanan.

Kenyataan dalam penelitian yang saya lakukan di lapangan terdapat fenomena yang terjadi dari LPM di Kelurahan Saigon yang ditemui oleh peneliti ialah setiap anggota LPM memiliki latar belakang pekerjaan dan kesibukan yang berbeda-beda ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wirausaha, pedagang, nelayan, buruh dan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan dan pertemuan tidak semua anggota LPM Kelurahan Saigon dapat hadir, sulitnya menentukan jadwal dan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan serta kegiatan yang dihadiri oleh semua anggota LPM Kelurahan Saigon sehingga yang datang hanya orang-orang tertentu dan itu-itulah saja. Selain itu peneliti melihat LPM Kelurahan Saigon belum memiliki fasilitas gedung sendiri sehingga tidak terlihat adanya aktivitas yang

dilakukan oleh seorangpun pengurus LPM Kelurahan Saigon serta tak terlihat adanya struktur organisasi, dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan LPM selain itu fenomena yang ditemui oleh peneliti ialah tidak adanya gaji bagi pengurus LPM sehingga mereka bekerja berdasarkan panggilan jiwa sosial saja dan juga minimnya dana yang ada dalam melakukan kegiatan atau program yang telah direncanakan sehingga terkadang dana berasal dari swadaya masyarakat sendiri.

Fenomena diatas merupakan permasalahan awal yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berkaitan dengan masalah yang telah digambarkan maka peneliti memfokuskan penelitian ini agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu penulis meneliti Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja Organisasi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Moehariono (2011:162-163) ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja:

- a) Responsivitas, yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b) Responsibilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara eksplisit.
- c) Akuntabilitas, yaitu menunjuk kepada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat atau masyarakat.

Berikut ini adalah penjelasan lebih jelas mengenai beberapa indikator kinerja:

a. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Menurut Dwiyanto (1995), responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dwiyanto (2006:63) mengemukakan bahwa indikator dari responsivitas adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat tidaknya keluhan dari penggunaan jasa selama satu tahun terakhir.
- 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa.
- 3) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan dimasa mendatang.
- 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa, serta

5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

b. *Responsibilitas(Responsibility)*

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit. Menurut Dwiyanto (2006 : 50), pengertian dari responsibilitas dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Responsibilitas dijadikan alat untuk menilai kualitas kerja sehingga dapat mengukur kelebihan dan kekurangan.

Responsibilitas menjelaskan tentang pelaksanaan organisasi publik telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi yang baik. Apabila pelaksanaan admistrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi dijalankan dengan baik maka kinerja akan dinilai semakin baik.

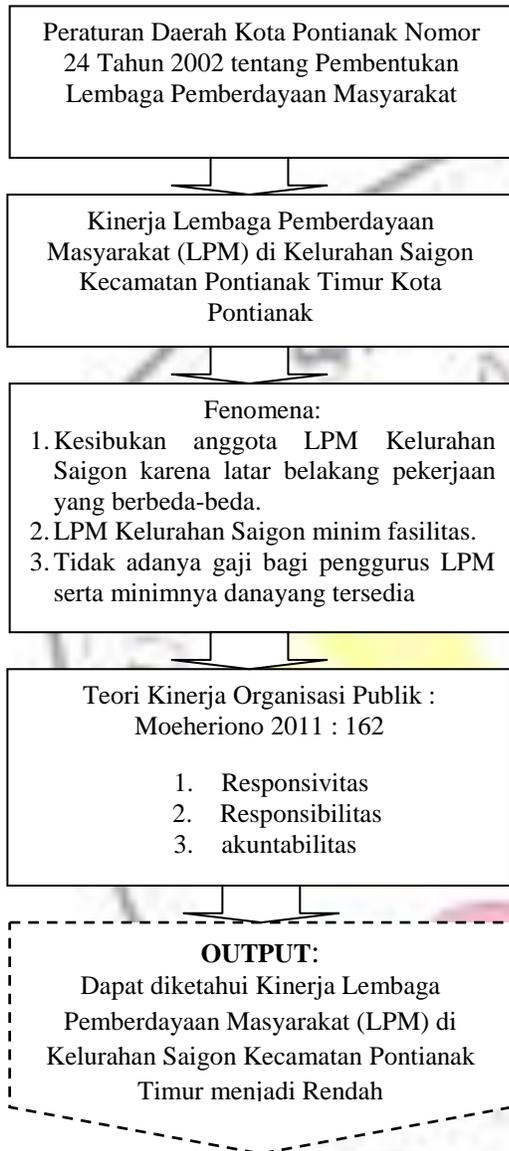
c. *Akuntabilitas(Accountability)*

Menurut penjelasan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit

mewujudkannya dari pada memberantas korupsi.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh data dalam penelitian. Moleong (2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain lain. Selanjutnya menurut Sugiyono (2013:241) menegaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih jauh pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Saigon dilihat dari indikator responsivitas, akuntabilitas dan responsibilitas seperti yang dijelaskan pada kerangka pikir.

D. PEMBAHASAN

Untuk melihat kinerja organisasi bisa dilihat dari beberapa indikator seperti Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dengan begitu sangat penting untuk memberi penilaian terhadap kinerja karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi terdapat kesamaan dasar pada substansialnya. Substansial ini dimaksudkan untuk mengetahui serta melihat sejauh mana tingkat dan pencapaian hasil yang telah dilaksanakan.

1. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur daya tanggap birokrasi berdasarkan keinginan, harapan dan aspirasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menyusun agenda yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas adalah unsur penunjang yang sangat penting dalam suatu lembaga karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi

publik dalam menjalankan tujuannya terutama memenuhi kebutuhan masyarakat.

Membahas mengenai tujuan organisasi publik maka melihat kemampuan dan daya tanggap dari LPM Kelurahan Saigon dalam menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat nya. LPM Kelurahan sebagai mitra dari pemerintah kelurahan harus mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat maka LPM Kelurahan Saigon harus peka dalam menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat dengan begitu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dapat diketahui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Saigon Ibu Juspriarti pada tanggal 16 oktober 2015 mengatakan bahwa:

“Iya memang LPM Kelurahan Saigon adalah mitra dari kelurahan yang mana kelurahan disini sebagai pembina membina dan juga sebagai fasilitator yah, LPM itu lembaga masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat jadi pengurus-pengurus yang ada didalamnya juga dari masyarakat di Kelurahan Saigon, juga karna yang merasakan dampak dari kegiatan LPM kan

masyarakat. Kalau mau tau lebih jelas langsung saja tanya ke LPM. ”

Senada dengan hasil wawancara kepada Lurah Saigon, bagian Kasi Pemerintahan Kelurahan Saigon Bapak Burhan M. Amin pada tanggal 16 oktober 2015 juga mengatakan bahwa:

“disini kelurahan itu sebagai pembina sesekali juga kadang LPM berkoordinasi dengan kami mengenai kegiatan dan rencana yang akan di buat”.

Berdasarkan wawancara tersebut jelas bahwa Kelurahan sebagai mitra dari LPM dan juga sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh LPM.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah yaitu Bapak Ahmad Toksin pada tanggal 16 oktober 2015 mengungkapkan :

“sebagai fasilitator Kelurahan Saigon menyediakan tempat untuk LMP mengadakan pertemuan atau kegiatan rapat. Biasanya LPM menggunakan aula Kelurahan Saigon untuk pertemuan atau rapat anggota”.

LPM Kelurahan sebagai wadah aspirasi untuk menampung segala aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat di Kelurahan Saigon, akan menjadi sangat optimal jika seluruh warga ikut berpartisipasi dan bekerja sama untuk mewujudkannya.

Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat di Kelurahan Saigon tahu bahwa ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Penyebabnya adalah masalah minimnya sosialisasi yang di lakukan oleh pengurus dan rendahnya keingintahuan masyarakat tentang lembaga pemberdayaan.

Ini diperkuat hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat ibu Jannah pada tanggal 1 November 2015 mengungkapkan :

“saye kurang tau ye , saye jak baru dengar tentang LPM ne.”

Begitu pun dengan ibu Leni pada tanggal 1 November 2015 mengatakan :

“kurang tau ye saye, paling saye tau urusan same pak RT jak, RW kalo LPM apetu kurang tau saye sibuk ngurus rumah gak..”

Berbeda dari hasil wawancara ibu Tumini pada tanggal 1 November 2015 yang mengatakan bahwa :

“pernah dengar saye kadang ibu-ibu kader posyandu tu kan biase minum diwarung saye ne, itulah mereke bilang kadang di bantu same LPM tu jadi taulah saye.”

Dari petikan wawancara tersebut terlihat bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang LPM apalagi masyarakat-masyarakat awam. Disinilah pentingnya sosialisasi oleh

penggurus LPM kepada masyarakat, bisa melakukan pendekatan melalui RT-RT atau RW sehingga masyarakat tahu dari mulut ke mulut. Selain itu juga tindakan nyata yang dilakukan LPM memberikan bantuan kepada masyarakat, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang terealisasikan dan terpenuhi maka masyarakat akan tahu bahwa ada lembaga yang menjadi wadah mereka untuk menampung aspirasi.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan salah satu ketua RT di Kelurahan Saigon bapak Cucu pada tanggal 19 oktober 2015 mengatakan bahwa :

“ kita pernah minta bantuan untuk membuat bak sampah kalo dak pun gerobak sampah untuk ngangkut semue sampah jadi tak payah lagi buang sendiri-sendiri tinggal nyuruh satu orang jak kan, tapi sampai sekarang belum ade kabar”.

Begitu pun dengan ketua RT bapak M.Yamin pada tanggal 19 oktober 2015 yang mengungkapkan :

“ pernah waktu itu ikut rapat dengan LPM di saigon tahu saye LPM kan sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat, tapi gimana ye pikir saye pasti lama banyak ini itu nye duit lagikan mendingan kita swadaya dari warga RT sini kan sumbangan sukarela untuk sarana kampung ni lebih cepat lagi.”

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa lambannya LPM Kelurahan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Saigon yaitu bantuan gerobak sampah. Dan dari pernyataan diatas juga dapat dilihat bahwa masyarakat bersikap tak mau ambil pusing dan seperti acuh tak acuh kepada LPM tersebut ada tidaknya lembaga tersebut sama saja bagi mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih suka menarik sumbangan langsung dari warga mereka dari pada menunggu dari LPM Kelurahan.

Peran aktif seluruh anggota LPM Kelurahan Saigon sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menanggapi kebutuhan yang ada pada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua anggota LPM Kelurahan di Saigon aktif dalam kegiatan dan rapat hanya beberapa anggota saja bahkan selalu orang yang sama yang datang setiap kegiatannya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Saigon bapak Rensistor pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan :

“memang kalau dalam rapat atau kegiatan LMP Kelurahan itu tidak semua pengurus bise datang karena mereka punye

kesibukan masing-masing karena kite nekan kerjenye bedede mane yang kerje berat sampai rumah udah capek jadi udah tak hirau lagi”.

Hal senada juga di ungkapkan dalam wawancara dengan salah satu pengurus LPM Kelurahan saigon bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan bahwa:

“saye pun tak tau kapan kadang LPM tu rapat paling dengar dari kawan-kawan jak, tapi mane lah nak pergi dah sibok cari duet”.

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa tidak semua pengurus aktif dalam kegiatan LPM di Kelurahan Saigon, para pengurus mempunyai kesibukan masing-masing dikarenakan latar belakang pekerjaan mereka berbeda-beda. Sehingga sulit menentukan waktu ataupun jadwal yang tepat untuk diadakannya rapat dan kegiatan yang dapat dihadiri oleh seluruh pengurus LPM Kelurahan. Melihat setiap pengurus di LPM mempunyai bidang yang berbeda-beda akan menjadi sangat optimal jika semua pengurus di setiap bidang dapat hadir dalam rapat ataupun kegiatan menggiatkan kebutuhan masyarakat bermacam-macam.

Sesuai dari hasil wawancara dengan bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengungkapkan bahwa :

“belum lagi jadwal rapat tu kadang-kadang pas kite lagi kerje, biase gak rapat tu malam kalo malam biselah kite ni datang kalo udah siang sore mane gak nak datang kan.”

Selain kendala menentukan jadwal rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh pengurus, kendala lainnya adalah tidak adanya gaji bagi pengurus LPM Kelurahan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan .

“lagi pula pun tak ade gaji kan jadi mendingan kite kerje cari duet kebetulan pula besampok dengan kerje kite tak kan kite tinggalkan.”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober 2015:

“awal-awal di bentuk ramai, tapi makin kesini makin sepi tak keliatan mane pengurusnye, paling ade waktu rapat Musrenbang itu juga orang-orang yang same, mungkin karne tak di gaji kali.”

Selanjutnya bapak Rinsistor sebagai Ketua LPM Kelurahan Saigon juga mengatakan :

“dalam melakukan kegiatan kite tidak pernah minta dari pusat, murni dari swadaya masyarakat seperti kerja bakti memperbaiki pos-pos keamanan ye secukupnya lah. Paling kalo pun ade bantuan die bukan berupa uang tapi seperti bantuan peralatan atau barang.”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa LPM Kelurahan sebagai media partisipasi masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip partisipasi dan menumbuhkan serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, yang merupakan satu diantara prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik, bukan suatu media masyarakat untuk mencari keuntungan. Dengan begitu LPM Kelurahan dapat menjadi wadah penampung aspirasi serta keluhan dan kebutuhan dari masyarakat untuk diselesaikan dan selanjutnya diteruskan kepada pihak Kelurahan untuk ditindaklanjuti.

Salah satu penyaluran aspirasi dari masyarakat yang dilanjutkan oleh LPM Kelurahan yaitu pada saat Musrenbang dimana LPM Kelurahan memperjuangkan apa saja yang telah disampaikan oleh masyarakat sehingga aspirasi dari masyarakat tadi dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu

akan membuat masyarakat percaya dan yakin bahwa aspirasinya telah diperjuangkan oleh LPM Kelurahan Saigon saat Musrenbang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LPM Kelurahan Saigon mengatakan bahwa mereka sudah menampung aspirasi yang berasal dari masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober 2015 yang mengungkapkan :

“ape-ape jak masukan dari masyarakat itu sudah kite tampung, baik itu berupa masukan, kritikan, sampai hal-hal yang tak masuk akal pun kite tampung nanti baru lah dibahas waktu rapat Musrenbang di Kelurahan. Cuma kan ade keterbatasnye tak semua bise kite wujudkan name nye juga program kan bukan hanya satu nanti kan diputuskan mane yang lebih diprioritaskan. Kalau dikabupaten jak udah gugur macam mane di tingkat pusat. Apelagi sekarang banyak faktornye dek orang tu banyak kepentinganne belom agik becampur same kepentingan politik.”

Responsivitas merupakan kemampuan daya tanggap lembaga mengenal kebutuhan masyarakat sehingga adanya keselarasan antara program dan kegiatan LPM Kelurahan. Kemampuan lembaga itu sendiri

juga menjadi salah satu pendorong majunya suatu lembaga. Responsivitas LPM Kelurahan di kelurahan Saigon sangat penting karena itu merupakan bukti bahwa lembaga tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga responsivitas dan lembaga saling berkaitan erat, jika suatu lembaga memiliki responsivitas yang rendah maka secara otomatis berpengaruh pada kinerja yang rendah pula.

2. **Responsibilitas**

Diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yang menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, harus ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Responsibilitas adalah segala pelaksanaan kegiatan oleh lembaga yang dilakukan berdasarkan prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan lembaga, baik yang secara eksplisit dan implisit.

LPM Kelurahan Saigon dalam menjalankan program-program harus sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil wawancara dengan pengurus LPM Kelurahan Saigon bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan :

“kite bekerja berdasarkan same aturan yang udah ade, aturan itu dari pusat.”

Senada dengan pengurus LPM, begitu pun pernyataan ketua LPM Kelurahan Saigon bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober 2015 mengungkapkan:

“ade aturannya, berdasarkan surat keputusan tentang susunan personalia LPM disitu ade bidang-bidang nye masing-masing ape-ape yang di lakukan.”

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Bambang pada tanggal 4 november 2015 mengatakan :

“orang-orang yang menepati bidangnya itu disesuaikan dengan latar belakang dunia mereka, saya menempati bidang kesehatan dan lingkungan hidup karena sesuai dengan background saya sebagai tenaga kesehatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengurus LPM Kelurahan Saigon sudah bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta sesuai bidang-bidang nya berdasarkan surat keputusan susunan dan personalia LPM

Kelurahan Saigon Nomor : 08/DPC-LPM/PTK/SK/IX/2013.

Responsibilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya yang di sampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan Saigon bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober 2015 yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya kepengurusan LPM kite ini cukup banyak ade sekitar 30an orang. Nah itu dari berbagai macam kalangan maksudnya bedede kerjaan ade guru, wirausaha. Nah seperti pak Bambang salah satu nye diye itu sebagai tenaga kesehatan makanya diye di porsikan dibidang kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi sesuai dengan bidangnya dan diye pun menguasainya.”

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh informan yang merupakan Ketua RT yaitu bapak Kurniadi pada tanggal 4 november 2015 yang mengatakan :

“saye jak tak tau tibe-tibe saye liat di surat tu ade name saye bile pula dibuat. Kenak di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Apepula mane lah saye paham saye ne kerje dipasar jualan ape hubungannya dengan itu.”

Hal senada juga di sampaikan oleh pengurus LPM yang membidangi bidang yang sama dengan bapak Kurniadi yaitu bapak Muchsin pada tanggal 6 november 2015 mengatakan :

“saye pun tak tau ikut-ikut jak. Cuma diatas kertas mane ade kegiatan ape-ape.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menempatkan pengurusnya LPM tidak sesuai dengan bidang dan latar belakang yang dimiliki, bahkan diantara mereka tidak mengetahui bahwa telah ditempatkan disuatu bidang. Sehingga terkesan bahwa LPM kurang berkoordinasi dengan anggota terkait dalam penentuan porsi pada bidang-bidang tugas yang akan di jabat. Dengan begitu, terlihat bahwa pengurus LPM belum mampu menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Yang kemudian akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Pengaruh lain bisa saja dari kepemimpinan LPM Saigon itu sendiri, hal ini coba peneliti tanyakan kepada salah satu pengurus LPM Kelurahan Saigon, bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan bahwa :

“tak ade masalah ye, bertanggung jawablah sikapnye ke kawan-kawan pun same tak ade bedede. Cuma kan menyatukan

beberape kepala ne kan susah ade yang gini ade yang gitu ye maok sabarlah omongan-omongan segale macam. Ketua tu kan perwakilan kite, nanti ketua nyampaikan ke kite ape hasil rapat dan segala macam”.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Bambang pada tanggal 4 November 2015 mengatakan :

“tak ade masalah, ade yang suka ade yang dak suke yah wajarlah. Tidak semua orang mau menyibukkan diri dalam suatu lembaga swadaya masyarakat apalagi tidak menguntungkan dari segi finansialnya”.

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa tidak ada masalah dalam kepemimpinan LPM di Kelurahan Saigon. Bahkan semua anggota tidak memperlakukan jika ketua terkesan dominan dan selalu ada dalam kegiatan rapat, karena itu tanggung jawab ketua sebagai perwakilan dari anggota nya, mengingat tidak semua anggota dapat hadir dan punya waktu untuk aktif mengikuti kegiatan di LPM Kelurahan Saigon.

Sebagai pemerintah Kelurahan yang merupakan mitra dari LPM, maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada LPM di Kelurahan Saigon dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah

diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Adanya pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang diberikan dapat menunjang kinerja LPM dalam menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Pernyataan Bapak Rinsistor, pada tanggal 21 oktober mengatakan :

“kalo pembinaan dari Kelurahan buat pengurus LPM sendiri sih jarang, itu waktu awal-awal pembentukan saja paling dari kelurahan memberikan arahan-arahan LPM seperti apa, selebihnya paling ketemu tu waktu rapat Musrenbang itu pun tak semua datang. Kalo ngadekan pelatihan buat masyarakat pernah, itu kite diajak same kelurahan.”

Selain pelatihan untuk LPM itu sendiri, kelurahan juga pernah bekerja sama dengan LPM melakukan kegiatan untuk ibu-ibu di kelurahan saigon yaitu kegiatan pelatihan anyaman.

Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat ibu Yusnidarti pada tanggal 6 november 2015 :

“ramai-ramai kite dari RT bedede perwakilan, ade pelatihan membuat anyaman itu kite dengar dari Kelurahan

kerje sama same LPM. Bagus kegiatannya jadi kite tau nambah gak ilmu, gratis.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Pak Rinsistor Ketua LPM pada tanggal 21 oktober juga mengatakan :

“belum lama, kite ade di ajak dari kelurahan buat ngasik pelatihan same ibu-ibu di Saigon yaitu menganyam. Antusias nye bagus positif.”

Dari petikan pernyataan diatas terlihat bahwa pemerintah kelurahan pernah bekerjasama dengan LPM untuk memberikan pelatihan menganyam kepada ibu-ibu di Kelurahan Saigon. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan masih memberikan perhatian kepada masyarakat. Tetapi tidak untuk LPM sepertinya pemerintah kelurahan kurang memperhatikan kinerja LPM dalam melaksanakan tugas padahal kelurahan disini sebagai pembina dan fasilitator.

Hal ini akan berpengaruh kepada kinerja LPM Kelurahan Saigon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip administrasi dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang prosedur dari LPM itu sendiri.

3. Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun didaerah, termasuk di lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Saigon. Akuntabilitas yang menjadi tuntutan masyarakat ini berkaitan dengan kebijakan, aktivitas birokrasi yang seharusnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat serta mendorong instansi publik agar lebih akuntabel dan transparan dalam melakukan penyusunan kebijakan, tindakan serta kerja yang telah dihasilkan. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

Akuntabilitas pemerintahan kepada publik, secara umum lebih diutamakan terhadap permasalahan yang bersifat pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dalam pemerintahan. Pada dasarnya konsep dan akuntabilitas diawali dengan pemikiran-pemikiran bahwa rakyat juga perlu mengetahui pertanggung jawaban yang tidak bersifat pada keuangan saja, tetapi juga pada non keuangan atau lebih

sering kita kenal dengan sebutan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja tidak hanya berpusat pada pertanggungjawaban administratif saja, akan tetapi tentang apa yang dapat dilakukan dipangannya. Dengan begitu dapat membandingkan hasil kinerja pada tahun tahun sebelumnya, sehingga perlu adanya kerjasama dan komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas LPM Kelurahan Saigon dapat dilihat dari keseriusan pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program yang telah ada.

Pada kenyataannya sebagian berfikir bahwa konsep akuntabilitas itu hanya mencakup pada pelaporan pertanggung jawaban saja, padahal akuntabilitas bukan hanya dalam bentuk sebuah laporan pertanggung jawaban tapi lebih luas mencakup apakah kegiatan yang telah direncanakan itu dilaksanakan, apakah bermanfaat atau tidak, terutama manfaatnya pada masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan.

Keberhasilan LPM Kelurahan Saigon dalam pencapaian sasaran dan tujuan berkaitan dengan kemampuan LPM Kelurahan itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat. Kegiatan

yang dilakukan oleh LPM Kelurahan Saigon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

LMP Kelurahan Saigon berkaitan dengan pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang mandiri akan menjadi subjek pembangunan sehingga apa yang diharapkan akan tercapai.

Pertanggung jawaban dari LPM Kelurahan Saigon dapat dilihat dari aktif tidaknya LPM itu dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Saigon. Peran aktif ini di ungkapkan oleh bapak Rinsistor sebagai Ketua LPM Kelurahan Saigon pada tanggal 21 oktober 2015 :

“setiap ade kegiatan Musrenbang di Lurah kite datang. Walupun tak semue bise datang tapi sebagai ketua saye mengikuti. Nanti di Musreimbang kite sampaikan ape yang menjadi mau nye masyarakat.”

Peran aktif LPM Kelurahan Saigon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini diperkuat oleh pernyataan

bapak RW Bambang pada tanggal 4 november 2015 :

“selama kegiatan Musrenbang yang datang lumayan ramai, tapi kalo dari LPM tu tak semue paling perwakilan jag. Yang seringtu paling ketue nye pak Rinsistor same beberape pengurus.”

Berbeda dengan pernyataan diungkapkan oleh RT bapak Ahmadi pada tanggal 6 desember 2015 yang mengatakan bahwa :

“saye tak pernah datang tak ade pula diundang. Jadi saye kurang paham benar dengan LPM.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka terlihat bahwa LPM Kelurahan belum berperan aktif secara optimal terhadap perencanaan dan pelaksanaan di Kelurahan Saigon. Terlihat dari kehadiran para pengurus LPM yang tidak semua hadir serta masih adanya RT yang tidak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan LPM di Kelurahan Saigon. Sehingga dapat diindikasikan bahwa LPM di Kelurahan Saigon masih kurang berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Bentuk tanggung jawab suatu lembaga terhadap kegiatan yang telah dilakukannya perlu dilampirkan dalam bentuk dokumentasi. Sebagai bukti bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu kegiatan. Begitu pula

dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Saigon. Hal ini di ungkap oleh bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober 2015 yang mengungkapkan :

“tanggung jawab itu pasti kite perjuangkan di Musrembang Kelurahan, tapi hasilnye diterima tau ndak kite tak tau yang penting kite udah sampaikan. Karne nanti diteruskan ke tingkat kecamatan lalu tingkat pusat.”

Dari penuturan tersebut terlihat wujud pertanggung jawaban LPM terhadap program atau kegiatan yang diberikan sudah baik. LPM berusaha menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat dalam Musrembang di Kelurahan Saigon. Selain ikut serta dalam Musrembang, LPM Kelurahan Saigon juga melakukan kegiatan kerja bakti berkala yang bekerja sama dengan RT-RT yang ada di kelurahan Saigon. Menurut pernyataan bapak Rinsistor ketua LPM Kelurahan Saigon pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan:

“kegiatan kerje bakti rutin kami adekan itu sebulan sekali dan bergantian di setiap RT. Tergantung dari warga RT nye mane yang warganya peka ramai yang turun. Karne kalau dikerje kan same-same lebih bagus.”

Dari ungkapan bapak Rinsistor tersebut mengatakan bahwa selain pada kegiatan Musrembang, LPM juga aktif melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar Kelurahan Saigon.

Tetapi saat melakukan observasi, peneliti tidak menemukan bentuk pertanggung jawaban berupa dokumen-dokumen dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh LPM. Seperti absensi pengurus dalam setiap pertemuan atau rapat. Selain itu juga tidak ditemukan wujud dari laporan pertanggung jawaban berupa dokumentasi hasil kegiatan yang dilaksanakan.

Dari pengamatan, wawancara serta data yang ada terlihat bahwa kegiatan dan program yang ada di lakukan oleh LPM berasal dari aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga LPM harus lebih sensitif melihat keadaan lingkungan di kelurahan Saigon dan tetap berpartisipasi pada responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam kinerja.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya mengenai kinerja Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) Kelurahan Saigon. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang “Bagaimana Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur”

1. Responsivitas

Dari segi Responsivitas LPM Kelurahan Saigon tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu sepenuhnya dalam menjalankan tujuannya menangani kebutuhan masyarakat di karenakan LPM Kelurahan Saigon dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dibuat kurang aktif, ini terbukti tidak semua anggota ikut menjalankan kegiatan yang telah dibuat dan aktif turun langsung di masyarakat. Sehingga masyarakat tidak dapat langsung merasakan dampak yang timbul dari kegiatan LPM Kelurahan Saigon, akibatnya LPM Kelurahan Saigon tidak dapat membaca dan menangani kebutuhan yang ada pada masyarakat.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang ditunjukkan LPM Kelurahan Saigon terlihat kurang baik. Ini di karenakan dari latar belakang bidang yang mereka jabati tidak sesuai dengan porsinya. Dimana anggota LPM

Kelurahan Saigon tidak tahu apa tugas yang harus dilakukan sesuai dengan bidang-bidangnya. Bahkan beberapa diantara mereka tidak mengetahui bidang apa yang mereka jabat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas LPM Kelurahan Saigon masih kurang, terlihat dari kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan peranggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Saigon. LPM Kelurahan Saigon juga tidak memiliki fasilitas gedung sendiri sehingga tidak adanya struktur organisasi yang nampak dan minimnya dokumen-dokumen yang berkaitan tentang LPM Kelurahan Saigon.

b) Saran

1. Untuk Pemerintah Kelurahan Saigon yang merupakan mitra dan fasilitator dari LPM Kelurahan Saigon dapat memberikan sedikit bantuan baik berupa alat atau barang ataupun pembinaan kepada pengurus LPM Kelurahan saigon yang aktif.

2. Untuk LPM Kelurahan Saigon dalam melakukan pertemuan ataupun rapat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh anggota dan pihak terkait guna menentukan jadwal yang tepat dimana seluruh anggota LPM Kelurahan Saigon dapat hadir. Setiap anggota dan pengurus yang terbentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya harus menanamkan sikap tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan tidak mengharapkan ketua saja yang bekerja ataupun bekerja menunggu perintah.

F. REFERENSI

➤ Buku-Buku:

BPS. 2014. *Pontianak City In Figures 2014*. Pontianak

Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press : Yogyakarta.

Indradi, Sjamsiar Syamsudin. 2010. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang : Agritek YPN Malang.

Keban, Yeremias. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Makalah, Seminar sehari, Fisipol, UGM : Yogyakarta.

Kumorotomo, wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Moheriono.2011. *Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Surabaya : Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarsa.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : Grasindo

Siagian, Sondang. 1998. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya : Diklat Prop. Dati I jatim.

Sugiyono.2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta.

-----2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisin, Hassel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasiando, anggota IKAPI.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Pers.

-----2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2005. *Membanguun Birokrasi Berbasis Kinerja*.Malang : Bayumedia Publishing

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.

➤ **Peraturan Perundang-undangan :**

Perda Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan LPM.

Perda Nomor 2 tahun 2008 Tentang kelurahan .

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang penataan LKMD atau sebutan lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Permendagri No.7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

➤ **Tulisan-tulisan (Jurnal, skripsi dan tesis)**

Firana. Penelitian tahun 2011. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di kelurahan karas Kecamatan Galang Kota Batam*. Universitas Maritim Raja Ali.

Nurul Hadiansyah. Penelitian tahun 2013. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembagunan Masyarakat di Kecamatan Teluk Keramat*. Universitas Tanjungpura.

➤ **Rujukan Elektronik :**

Sunarti. 2008. *Diktat I dan II Mata Kuliah Ketahanan dan Pemberdayaan*. Fakultas ekologi manusia. IPB, Diambil pada tanggal 22 Mei 2015 dari <http://www.program.pemberdayaan.pdf>